

# **PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019**

**Citra Pujia Utami**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia*

E-mail : Citrapujia16@gmail.com

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadi permasalahan mengenai partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum optimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan lapangan. Teknik analisis data dengan tahap reduksi, tahap display dan tahap verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian baik melalui observasi dan wawancara mengenai Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik serta belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 2) Hambatannya terdiri dari: a) Sikap ketidakpedulian masyarakat. b) Partisipasi politik Golongan Putih (Golput). c) Sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidak tertarikannya secara aktif. d) Keterlibatan kelompok masyarakat dalam partisipasi politik. 3) Upaya guna mengatasi hambatan, yakni sebagai berikut: a) Memberikan pembinaan dan pendidikan politik. b) Meningkatkan sosialisasi Pilkades. c) Meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia melalui pendidikan politik. d) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok masyarakat.*

**Kata Kunci :** *Partisipasi Politik Perempuan, Pilkades*

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia kental dengan budaya patriarki, masyarakat masih beranggapan bahwa dunia politik merupakan ranah publik yang identik

dengan aktivitas laki-laki. Keberadaan perempuan dalam posisi pemimpin dan pengambil keputusan masih menjadi permasalahan, bahkan tidak jarang ada pihak yang melihat keberadaan

perempuan secara diskriminatif. Ada sikap dan pandangan yang berbeda, ada yang sangat menyetujuinya dan ada yang merasa khawatir dengan kompetensi dan aspirasi baru perempuan. Selain itu, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan maka perempuan harus membekali dirinya dengan kompetensi, keahlian (skill) dan kapasitas politik. Jika tidak, kondisi perempuan akan terus terpuruk dan perubahan yang menyangkut kepentingan perempuan tidak akan pernah terjadi.

Kedudukan dan peran politik perempuan dalam struktur politik masih sangat kurang karena adanya dominasi laki-laki dalam partai politik, termasuk struktur politik yang sudah menempatkan aktivitas politik perempuan pada tingkatan paling rendah. Peran perempuan di dunia politik sangat diperlukan, bukan hanya untuk memenuhi haknya sebagai warga negara untuk terlibat dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga untuk ikut melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara itu sendiri. Perempuan juga memiliki kapabilitas untuk terlibat di wilayah publik dan cenderung berdampak positif dalam setiap representasinya, namun hanya masalah kesempatan dan paradigma yang patriarkis yang menjadi hambatan bagi berlangsungnya partisipasi politik perempuan.

Kedekatan pribadi sering kali banyak dipakai oleh masyarakat untuk menentukan pilihannya, dalam hal ini pendidikan politik perlu dikembangkan

apalagi bagi kaum perempuan. Seringkali kaum perempuan kurang paham dengan politik, sehingga mereka selalu pasrah dengan keputusan yang dibuat oleh laki-laki dan hal ini menimbulkan pemikiran bahwa kodrat seorang perempuan hanyalah dirumah mengurus rumah tangga tanpa perlu terlibat dalam aktivitas publik.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada tanggal 30 November 2019 di Lapangan Dusun Sukamanah Desa Cintaratu dengan calon Kepala Desa terdiri dari 5 orang. Adapun partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap ) sebanyak 2.707 orang, Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya 493 orang, Jumlah DPT Perempuan yang memilih sebanyak 1.373 orang, Jumlah pemilih perempuan sebanyak 950 dan tingkat partisipasi perempuan sebanyak 69,19%. Kendala pokok yang sering sekali dipergunakan sebagai alasan lemahnya partisipasi politik perempuan, dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni hambatan internal dan hambatan eksternal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diindikasikan bahwa terjadi permasalahan mengenai partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran belum optimal.

Hal ini dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi perempuan dalam Pilkades masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari susunan panitia Pilkades yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan hanya 1 orang perempuan, petugas pemungutan suara di masing-masing TPS terdiri dari 9 orang laki-laki tidak ada perempuan yang menjadi petugas pemungutan suara, dalam pelaksanaan kampanye yang hadir ada 73 orang dari perwakilan masyarakat yang terdiri dari 68,5% laki-laki dan 31,5% perempuan.
2. Adanya persepsi atau pandangan dari kaum perempuan yang menganggap bahwa politik bukanlah urusan bagi kaum perempuan sehingga tingkat peran serta kaum perempuan dalam pemilihan kepala desa masih minim. Partisipasi politik perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, contohnya dalam Musyawarah dan Musyawarah Desa (Musdes).
3. Tidak adanya calon kepala desa dari kaum perempuan dan didominasi oleh laki-laki, sehingga menimbulkan pemikiran tidak adanya yang mewakili kaum perempuan dalam hal penyampaian aspirasi.

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, Untuk membatasi

masalah yang diteliti peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019?
3. Bagaimana upaya-upaya guna mengatasi hambatan dalam meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019?

## **KAJIAN PUSTAKA**

Partisipasi berasal dari bahasa latin, yaitu *Pars*, yang artinya bagian dan *capare (sipasi)*, artinya mengambil. Bila digabungkan berarti mengambil bagian. Dalam bahasa inggris *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Menurut Sahid, (2011:176) mengemukakan bahwa: “partisipasi berarti mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktifitas atau kegiatan politik suatu negara”. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi, sebagai asumsi yang mendasari demokrasi dan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah dirinya sendiri (Surbakti,

2009:140). Berdasarkan pandangan tersebut dapat dijelaskan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam menentukan kehidupan individu itu sendiri ke arah yang lebih baik.

Partisipasi menjadi kunci dalam suatu negara demokrasi, karena dalam proses demokrasi membutuhkan partisipasi, tanpa partisipasi adalah manipulasi dalam demokrasi, karena partisipasi dan demokrasi merupakan dua dasar dengan nilai entitas yang sama. Konsep demokrasi tumbuh melalui partisipasi, asumsi dasar kita bahwa demokrasi berasal dari partisipasi (Juliansyah, 2007:83-83).

Menurut Gaventa dan Valderama (Sahid,2011:176) mengemukakan bahwa: 'Partisipasi politik adalah adanya pelibatan interaksi perseorangan atau organisasi, biasanya partai politik dengan negara.' Dengan demikian partisipasi politik adalah merupakan orientasi pada mempengaruhi dan menundukkan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan ketimbang partisipasi aktif dan langsung.

Selanjutnya Huntington dan Nelson (Sahid, 2011:177-178) mengemukakan batasan-batasan partisipasi politik yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi politik menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Dalam hal ini adanya komponen subjektif seperti orientasi politik, yang meliputi pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik,

keaktifan politik. Sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan-tindakan bukan tindakan politik.

- b. Subjek partisipasi politik yaitu warga negara. Dimana kegiatan yang dilakukan terputus-putus, bersifat sekunder dibandingkan dengan peranan-peranan sosial.
- c. Partisipasi politik yang dilakukan hanya untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat pemerintahan yang memiliki kewenangan politik. Sasarannya adalah mengubah keputusan pejabat yang sedang memerintah, tujuan itulah yang menjadi batasan terlepas apakah legal maupun ilegal.
- d. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah terlepas apakah tindakan tersebut memiliki efek atau tidak, berhasil atau gagal.
- e. Partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasi. Partisipasi otonom merupakan partisipasi politik atas dasar kemauannya sendiri, sedangkan partisipasi yang dimobilisasi merupakan karena digerakkan orang lain.

Menurut Budiardjo, 2007:367 mengemukakan bahwa:

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*publik policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*lobbying*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action* nya, dan sebagainya.

Rush dan Althroff (Sahid, 2011:185) mengemukakan 4 fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai sarana mengejar kebutuhan-kebutuhan ekonomis.
2. Sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial.
3. Sebagai sarana mengejar nilai-nilai khusus.
4. Sebagai sarana untuk memenuhi keutuhan alam bawah sadar dan kebutuhan psikologis tertentu.

Sedangkan Sastroatmodjo (Sahid, 2011:183) membagi fungsi partisipasi politik ke dalam 3 kategori yaitu:

- a. Memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah yang dibentuknya beserta sistem politik yang dibentuknya.
- b. Sebagai usaha untuk menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah.
- c. Sebagai tantangan terhadap penguasa dengan maksud menjatuhkannya sehingga kemudian diharapkan terjadi perubahan struktural dalam pemerintahan dan dalam sistem politik, misalnya melalui pemogokan, huru-hura dan kudeta.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, fungsi partisipasi politik diarahkan dalam kegiatan pemilihan baik berupa tuntutan maupun dukungan kepada pemerintah sebagai upaya kontrol/pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

Partisipasi politik juga memiliki kepentingan baik untuk pemerintah itu sendiri yaitu dalam hal mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 maupun kepentingan masyarakat. Pembangunan suatu bangsa dan negara dimulai dari adanya partisipasi politik melalui pemilihan umum sehingga terjadi adanya konstalasi dan kontrak politik antara calon pemimpin dengan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan di negara berawal dari adanya pemilihan umum dalam

menentukan pemimpin. Melalui partisipasi politik dalam pemilihan umum diharapkan tujuan-tujuan pembangunan dapat tercapai.

Menurut Sahid, (2011:184) mengemukakan fungsi partisipasi politik bagi pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendorong program-program pemerintah. Ini berarti bahwa peran serta masyarakat diwujudkan untuk mendukung program politik dan program pemerintah.
- b. Sebagai institusi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan pembangunan.
- c. Sebagai sarana untuk memberikan masukan, saran dan kritik terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Fungsi partisipasi politik terutama dalam pembangunan suatu bangsa dan negara tidak terlepas dari bagaimana masyarakat memandang pentingnya efek atau dampak dari kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini diharapkan pembangunan itu didasarkan pada dukungan dari masyarakat, yang berawal dari adanya partisipasi politik masyarakat melalui pemilihan pemimpin pemerintahan.

Menurut Huntington dan Nelson (Sahid, 2011:190) mengemukakan

pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan yaitu:

- a. Sebagai satu tujuan utama kaum elit politik, kekuatan-kekuatan sosial, dan perseorangan-perseorangan yang terlibat dalam di dalam proses.
- b. Sebagai sarana kaum elit, kelompok-kelompok dan perorangan untuk mencapai tujuan-tujuan lain yang mereka nilai tinggi.
- c. Sebagai hasil sampingan atau konsekuensi tercapainya tujuan-tujuan lain, baik oleh masyarakat secara keseluruhan, kaum elit, kelompok-kelompok dan perorangan dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, partisipasi politik yang dilakukan oleh masyarakat sebagai aktualisasi kepentingan baik pribadi maupun kelompok karena secara tidak langsung kegiatan politik yang dilakukan oleh masyarakat memiliki tujuan.

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas, tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam mencapai tujuan kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, partisipasi politik dilakukan lebih menitikberatkan pada suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang menghargai setiap hak-hak politik masyarakat baik dalam skala

pemilihan pemimpin maupun mendistribusikan kebijakan yang ditetapkan bersama.

Lebih lanjut Milbrath (Sahid, 2011:186) mengemukakan 4 variabel alasan bervariasinya partisipasi politik masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan penerimaan perangsang seseorang.
2. Berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang.
3. Menyangkut sifat dan sistem politik dan partai tempat seseorang itu berada.
4. Perbedaan geografis dan lingkungan.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan, partisipasi politik masyarakat akan dipengaruhi bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk rangsangan sehingga informasi tersebut akan berdampak pada keikutsertaan masyarakat.

Selanjutnya Almond (Sahid, 2011:179) mengemukakan bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Kelompok kepentingan yaitu mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintahan (*ombudsman*), misalnya dalam pelayanan publik.
2. Kelompok anomik, yaitu kelompok yang terbentuk secara spontan karena

frustasi, kecewa, mereka turun ke jalan karena rasa ketidakadilan. Ini diakibatkan partai politik tidak bisa mewakili kepentingan mereka.

3. Kelompok non-asosiasional, yaitu kelompok yang terbentuk tidak terorganisir maupun spontan tetapi lebih karena persamaan ras, wilayah, agama, pekerjaan maupun kekeluargaan.
4. Kelompok institusional, yaitu bentuk kelompok yang lebih modern karena sudah adanya struktur dan fungsi yang jelas seperti partai politik, korporat bisnis, legislatif, militer, birokrasi, persekutuan gereja, dimana mereka mendukung kelompok khusus dan mewakili anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.
5. Kelompok *asosiasional*, yaitu kelompok yang dibentuk untuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.
6. *Civil society*, yaitu kelompok masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan atau kontrol dari pemerintah berupa aturan, yang

merupakan asosiasi yang bersifat sukarela.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan, partisipasi politik terbentuk melalui proses secara terstruktur yang dilakukan secara kolektif/kelompok yang diarahkan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah karena adanya kepentingan.

Wahyudin (Sahid, 2011:180), mengemukakan bentuk partisipasi politik masyarakat berdasarkan tipe masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat primitif, yaitu mereka yang kehidupan politiknya cenderung erat berintegrasi dengan kegiatan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu partisipasi masyarakat cenderung tinggi.
2. Masyarakat berkembang, yaitu merupakan adanya kombinasi dari institusi dan pengaruh modern dengan tradisional. Partisipasi masyarakat umumnya dibatasi oleh faktor-faktor seperti tingkat melek huruf dan masalah umum, oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat dalam beberapa bentuk sangat tinggi dan yang lainnya cenderung rendah.
3. Masyarakat totaliter, yaitu masyarakat yang berusaha mengontrol partisipasi dalam proses politik pada semua tingkatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif atau dengan metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian ini adalah 8 bulan.. Informan dalam penelitian ini sebanyak 13 orang terdiri dari Kepala Desa 1 orang, Panitia Pilkades 4 orang, Tokoh Masyarakat 3 orang, Pemilih Perempuan 5 orang. Teknik Pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik Pengolahan data/analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019**

Menurut Budiardjo, (2009:367) mengemukakan bahwa: Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dalam pendekatan yang dikemukakan Roth dan Wilson, (Budiardjo, 2009: 372-373), terdapat 4 dimensi, Oleh karena itu terdapat bentuk partisipasi politik dalam masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yaitu :

- (1) Aktivistis,
- (2) Partisipan,
- (3) Penonton,
- (4) Apolitis.

## **METODE**



Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dapat diketahui bahwa Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 dapat dipengaruhi oleh sistem politik maupun pemerintahan. dan terdapat 8 indikator sebagai berikut :

### **1. Aktivis**

#### **a. Adanya perwakilan masyarakat dari kaum perempuan yang mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada kaum perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa di Desa Cintaratu semua nya calon Kepala Desa laki-laki.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa tidak adanya perwakilan masyarakat dari kaum perempuan yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu disebabkan oleh kurangnya minat menjadi pemimpin bagi kaum perempuan.

#### **b. Adanya Keterlibatan Kelompok Masyarakat Dari Kaum Perempuan Dalam Mengusung Calon Kepala Desa.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya keterlibatan kelompok masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan

sebagai wujud partisipasi dalam mengusung calon Kepala Desa pada Pilkades tahun 2019 di Desa Cintaratu.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kelompok masyarakat dari kaum perempuan dalam mengusung calon Kepala Desa di Desa Cintaratu sangat kurang progresif baik dalam mengawasi kinerja panitia pilkades maupun keterlibatan langsung dan aktif dalam penyelenggaraan pilkades.

### **2. Partisipan**

#### **a. Adanya masyarakat dari kaum perempuan yang menjadi simpatisan terhadap calon kepala desa dalam pelaksanaan pilkades.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa masih rendahnya keterlibatan masyarakat yang menjadi simpatisan pada pilkades di Desa Cintaratu serta masih jauh dari harapannya,

Berdasarkan atas jawaban-jawaban tersebut, maka dapat ditarik penjelasan bahwa simpatisan masyarakat menjadi modal awal bagi calon guna mengukur elektabilitas sehingga masyarakat akan mengenal calon bukan hanya dari ketenaran tetapi dari program-program kerja yang dijanjikan kepada masyarakat kampanye.

#### **b. Adanya pemilih perempuan yang menjadi tim sukses dalam pelaksanaan pilkades dari tiap-tiap calon Kepala Desa.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya masyarakat yang menjadi tim sukses dari masing-masing calon dalam menjalankan tujuannya kepada masyarakat serta mampu menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pada pilkades tahun 2019 di Desa Cintaratu.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pelaksanaan pilkades di Desa Cintaratu masih sangat kurang memberikan kontribusi terhadap calon Kepala Desa.

### **3. Penonton**

#### **a. Pemilih perempuan yang menjadi daftar pemilih tetap yang dilakukan panitia pilkades.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya masyarakat yang menjadi daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh panitia pilkades dan BPD cukup baik karena melalui pendataan dan pelibatan langsung oleh ketua RT setempat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya masyarakat yang menjadi daftar pemilih tetap dan dilakukan berdasarkan data yang ditetapkan oleh RT dan cukup valid. Hal ini terlihat dari tiap-tiap ketua RT dilibatkan oleh panitia pilkades guna mendata masyarakat.

#### **b. Keterlibatan pemilih perempuan dalam lobby politik yang mengikutsertakan kaum perempuan yang dilakukan oleh**

#### **tim pemenangan kepada masyarakat dalam pilkades.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya keterlibatan masyarakat yang menjadi tim pemenangan dari tiap calon Kepala Desa khususnya dalam menjaga etika dalam pencoblosan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, maka dapat ditarik penjelasan tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam lobby politik yang dilakukan oleh tim pemenangan kepada masyarakat dalam pilkades di Desa Cintaratu tahun 2019 dan masih dirasa kurang maksimal dalam melibatkan masyarakat dalam lobby politik yang dilakukan pada saat pilkades.

### **4. Apolitis**

#### **a. Adanya pemilih perempuan yang melakukan golongan putih (Golput) dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan, maka dapat ditarik penjelasan angka masyarakat yang Golput cukup tinggi saat Pilkades di Desa Cintaratu tahun 2019, hal ini mengakibatkan tingkat partisipasi politik perempuan yang menggunakan hak pilih hanya mencapai 70,54% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi politik perempuan yang dilakukan oleh masyarakat yang dianggap kurang peduli pada pemilihan

sehingga hak-hak memilih tidak digunakan saat pemilihan. Sikap golput tersebut dianggap sebagai sikap yang kontra produktif terhadap tujuan-tujuan dari pemilihan yang kurang memberikan dampak positif terhadap masyarakat secara keseluruhan.

**b. Adanya pemilih perempuan yang menunjukkan ketidakpedulian dalam pelaksanaan Pemilihan kepala desa.**

Berdasarkan keseluruhan pendapat informan di atas dapat disimpulkan, bahwa secara garis besar sikap masyarakat masih banyak yang kurang peduli pada pelaksanaan Pilkadaes, peranan partisipasi aktif dari masyarakat dirasa kurang optimal. Masyarakat banyak menganggap pemilihan kepala desa tidak memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan dan pembangunan khususnya bidang ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa Partisipasi Politik Perempuan Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, kurang dilaksanakan dengan baik serta belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

**Hambatan-Hambatan dalam Meningkatkan Partisipasi politik perempuan pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan**

**Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan dalam Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019. diantaranya :

1. Lebih kepada perempuan selalu sibuk dan keterbatasan dalam bersosialisasi.
2. Dari kaum perempuan pada periode tahun lalu yang memilihnya sangat minim,sebab yang diharapkan calon Kepala Desa dari pihak laki-laki.
3. Merasa tidak berani karena melihat calon-calon lain laki-laki semua mereka pesimis untuk menang.
4. Faktor dari usia karena zaman dulu rata-rata lulusan SMP,SMA,bahkan adapun yang lulusan SD.
5. Masyarakat mengharapkan Calon Kepala Desa dari kaum laki-laki, memang perempuan juga bisa tapi biasanya perempuan sama laki-laki pola pikirnya lebih cenderung ke laki-laki.
6. Mereka tidak bisa sebebannya mengikuti kegiatan para calon Kepala Desa dalam berkampanye karena dilaksanakannya pada malam hari dari tiap-tiap dusun.
7. Calon Kepala Desa dari kaum perempuan tidak aktif dalam kegiatan ibu-ibu atau kegiatan organisasi.

8. Kaum perempuan masih kurang berpengalaman dalam upaya mensosialisasikan bakal calon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan mengenai Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 masih belum maksimal.

#### **Upaya-upaya Untuk Mengatasi Hambatan dalam Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai upaya-upaya dalam Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun 2019. diantaranya :

1. Mungkin untuk di izinkan oleh suami, dengan meningkatkan komunikasi agar dapat memupuk kelebihan dan kemandirian untuk ke depannya.
2. Dari kaum perempuan dalam mencalonkan kepala desa dengan merekrut pengajian ibu-ibu dibangkitkan lagi tim penggerak PKK.
3. Untuk memberi dorongan terhadap kaum perempuan supaya ingin mencalonkan diri, orang-orang terkemuka di desa cintaratu ikut mensosialisasikan, mengarahkan diantaranya kaum perempuan yang aktif dan tanggap terhadap kegiatan di Desa.

4. Dari masyarakat yang harus menjadi calon kepala desa di Desa Cintaratu itu sebisa-bisa harus laki-laki.
5. Memberi pengertian kepada masyarakat bahwa kaum perempuan layak menjadi pemimpin dan menyampaikan visi misi dari calon Kepala Desa.
6. Pendekatan panitia terhadap pengusung dari kaum perempuan ataupun komunikasi terhadap kaum perempuan yang berarti pendekatan panitia dengan kaum perempuan harus selalu berkomunikasi.
7. Mereka dari kaum perempuan berupaya untuk mendo'akan kepada para calon yang 5 orang sesuai pilihannya masing-masing.
8. Harus bisa merayu kepada kaum perempuan yang akan mencalonkan sebagai Kepala Desa.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, baik melalui observasi dan wawancara terhadap informan mengenai partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan

Parigi Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik serta belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kurang dilaksanakan dengan baik jika dilihat dari bentuk partisipasi politik dalam masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan, yakni aktivis (*activist*), partisipan (*participant*), penonton (*onlookers*) dan apolitis (*apoliticals*).

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yakni:
  - a. Hambatan sikap ketidakpedulian masyarakat dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2019 di Desa Cintaratu. Contohnya: sikap sebagian masyarakat yang merasa bosan dan jenuh terhadap Pilkades sehingga menganggap kurang memberikan dampak pada tingkat kesejahteraan.
  - b. Hambatan partisipasi politik Golongan Putih (Golput) dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2019 di Desa Cintaratu.

Contohnya tingkat partisipasi politik dari Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 2.707 orang, Masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya 493 orang, Jumlah DPT Perempuan yang memilih sebanyak 1.373 orang, Jumlah pemilih perempuan sebanyak 950 dan tingkat partisipasi perempuan sebanyak 69,19%.

- c. Hambatan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidak tertarikannya secara aktif dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Contohnya rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat masih rendah yakni tamatan SMP dan terbelang awam mengenai pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa guna kesejahteraan bersama.
- d. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat upaya guna mengatasi hambatan dalam partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yakni sebagai berikut: a) Memberikan pembinaan dan pendidikan politik kepada masyarakat akan pentingnya Pilkades guna kemajuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. b) Meningkatkan

sosialisasi Pilkades kepada warga masyarakat serta menekankan menggunakan hak pilihnya pada Pilkades. c) Meningkatkan kompetensi dan sumber daya manusia melalui pendidikan politik, kaderisasi yang bekerjasama dengan partai politik maupun organisasi masyarakat di Desa Cintaratu. d) Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses serta pelaksanaan Pilkades.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adi, *Isbandi* Rukminto. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI.
- A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. (1992). *Analisis data kualitatif Terj.* Tjejep Rohidi. Jakarta : UI Press,
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dwi Siswoyo. (2007). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Pers.
- Fahmi, Irham. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Depdiknas Bapenas Adicitakaryanusa
- Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo
- Gustiana. (2015). *Pengawasan Partisipatif*. Yogyakarta : Unpad
- Hadari, Nawawi. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada
- Handyaningrat, Soewarno. (2010). *Pengantar Studi ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta
- Hasibuan, Malayu S.P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- John W Santrock. *A lifespan Development. Edisi ke Lima Jilid II*. Jakarta : Erlangga.
- Juliansyah, Elvi. (2007). *PILKADA Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Made, Pidarta. (2005). *Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.

- Nawawi, Hadar. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjamada.
- Papalia, dkk. 2008. *Human Development (Psikologi Perkembangan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sadu Wasistiono & Irwan Tahir, (2006): *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung: CV. Fokusmedia.
- Sahid, Komarudin. (2011). *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Sanit, Arbit. (2007). *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik, dan Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Schermerhorn. (2003). *Manajemen Program Pengawasan dan Pengendalian*. Yogyakarta : ANDI
- Soehartono, Irawan. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Cetakan Ke tujuh. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sondang P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Cetakan Ke-17. Bandung : Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. (2009). *Memahami Ilmu Politik*. Cetakan keempat. Jakarta: PT. Grasindo.
- Syafiie, Kencana, Inu. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.
- Usman, Husaini. (2011). *Manajemen. Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*. Bumi. Aksara. Jakarta